



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442 FAKSIMILE (021) 3509443 SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- ~~808~~ /PK/2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Informasi kepada Daerah tentang Penyaluran
Tahap Ketiga Dana Cadangan DTP Guru PNSD Tahun 2016

5 Desember 2016

Yth. Bupati/Walikota
(Terlampir)

Sehubungan dengan perihal pada pokok surat di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam hal terdapat kurang salur Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) pada tahun berjalan, akan diperhitungkan dengan dana cadangan atau alokasi DTP Guru PNSD pada tahun anggaran berikutnya. Penyaluran dana cadangan DTP Guru PNSD dimaksud dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Berdasarkan surat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64959/A.A.1/1/PR/2016, tanggal 1 November 2016, hal Permohonan Pencairan Dana Cadangan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Bagi Guru PNSD Tahap III TA 2016, kami telah melakukan penyaluran tahap ketiga Dana Cadangan DTP Guru PNSD tahun 2016 kepada 42 (empat puluh dua) daerah yang telah melaporkan kekurangan dana untuk pembayaran DTP Guru PNSD tahun 2016.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Dana Perimbangan



Rukijo
NIP. 19670210 199310 1 001

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**PENYALURAN DANA CADANGAN TAHAP KETIGA
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TA 2016**

No	Nama Daerah	Dana Cadangan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang Disalurkan (dalam Rupiah)
1	Kab. Sukoharjo	1.118.050.000
2	Kota Pekalongan	733.000.000
3	Kab. Jombang	859.100.000
4	Kab. Blitar	1.071.956.000
5	Kab. Aceh Utara	322.688.000
6	Kab. Aceh Barat	459.925.000
7	Kab. Karo	129.500.000
8	Kab. Batubara	761.300.000
9	Kab. Sijunjung	493.800.000
10	Kab. Batanghari	853.048.000
11	Kab. Banyuasin	1.725.637.500
12	Kab. Pringsewu	213.075.000
13	Kab. Tulang Bawang Barat	419.050.000
14	Kab. Pesisir Barat	649.800.000
15	Kab. Kayong Utara	1.977.269.499
16	Kota Singkawang	37.550.000
17	Kab. Kotawaringin Timur	308.500.000
18	Kab. Kotawaringin Barat	492.750.000
19	Kab. Katingan	1.648.112.500
20	Kab. Sukamara	495.250.000
21	Kab. Hulu Sungai Tengah	164.050.000
22	Kota Samarinda	53.700.000
23	Kab. Kepulauan Talaud	1.419.300.000
24	Kota Tomohon	336.750.000
25	Kab. Luwu	1.600.300.000
26	Kab. Kolaka Timur	1.269.800.000
27	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.754.122.366
28	Kab. Kepulauan Aru	1.633.548.000
29	Kab. Lombok Utara	273.750.000
30	Kota Kupang	488.980.000
31	Kab. Timor Tengah Utara	3.314.352.500
32	Kab. Sikka	1.421.825.000
33	Kab. Ngada	2.422.125.000
34	Kab. Lanny Jaya	566.700.000
35	Kab. Bengkulu Utara	246.000.000
36	Kab. Pandeglang	2.075.050.000
37	Kab. Serang	556.962.500
38	Kota Cilegon	644.822.415
39	Kota Serang	1.368.363.000
40	Kab. Bangka Tengah	600.650.000
41	Kab. Boalemo	71.750.000
42	Kab. Majene	1.430.250.500
		38.482.512.780